

Nama: Veri Erika

NPM: 2512120014

Matakul: Akuntansi Sektor Publik

Sumber: Hans Victor Sikep

Penerbit: PT. Sanpedia Publishing Indonesia

Soal

1. Diskusikan prospek dan permasalahan dalam Pengaplikasian konsep Balanced Scorecard Pada organisasi sektor Publik; khususnya Pada Pemerintahan daerah
2. Analisislah Key Success Factor Pada organisasi Pemerintahan daerah, Setelah itu tentukan Key Performance Indicator-nya!
3. Diskusikan bagaimana cara menciptakan sistem manajemen kompensasi yang dapat mendorong kinerja Pemerintah!
4. Jelaskan strategi implementasi Pengukuran kinerja Value For Money!
5. Jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan Indikator kinerja!

Jawaban

1. Balanced Scorecard memiliki prospek yang baik bagi organisasi sektor Publik karena dapat digunakan sebagai alat Pengukuran kinerja Pemerintahan. Secara keseluruhan, baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan. Dalam Pemerintahan daerah, Balanced Scorecard membantu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, efektivitas Pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah.

Dalam Pengelolaan keuangan daerah, anggaran memiliki fungsi penting sebagai alat Perencanaan sekaligus alat Pengendalian Pemerintah. Pemerintah daerah dalam menjalankan operasinya berdasarkan pada APBD dan ketentuan Perundang-undangan.

namun Penerapan Balanced Scorecard juga menghadapi beberapa permasalahan seperti:

- ↳ keterbatasan sumber data manusia
- ↳ kurangnya sistem informasi yg memadai
- ↳ sulitnya menentukan indikator kinerja
- ↳ serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung sistem Pengukuran kinerja modern

Selain itu, Pemerintah memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi Proses Politik, Sistem otonomi daerah, serta hubungan antara Pajak dan Pelayanan Pemerintah.

2. ↳ Key Success Factor (KSF)

Faktor keberhasilan utama pemerintah daerah meliputi:

- Kualitas Pelayanan Publik
- Efektivitas Pengelolaan APBD
- Transparansi dan akuntabilitas keuangan
- Ketepatan Penyusunan laporan keuangan
- Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan keuangan Pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan Pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib menyusun tujuh laporan keuangan, yaitu:

1. laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. laporan Arus kas (LAK)
5. laporan Operasional (LO)
6. laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

↳ Key Performance Indicator (KPI)

Indikator Kinerja Pemerintah daerah dapat berupa

- Tingkat Realisasi APBD
- Ketepatan Penyusunan laporan keuangan
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Efektivitas belanja daerah
- Kualitas Pelayanan Publik
- Serta Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah

Laporan arus kas digunakan untuk menjelaskan Sumber Penerimaan dan Penggunaan kas Pemerintah daerah dari aktivitas Operasi, Investasi, Pembiayaan, dan non anggaran.

3. Sistem manajemen kompensasi dalam unit kerja Pemerintah dapat dilakukannya dengan :

- memberikan penghargaan berdasarkan Prestasi kerja
- menerapkan sistem insentif yang adil
- menghubungkan kompensasi dengan Pencapaian target kinerja
- melakukan evaluasi kerja secara berkala
- Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pengembangan

Sistem tersebut dapat mendorong pegawai Pemerintah bekerja lebih efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pengelolaan keuangan Pemerintah harus tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Strategi Implementasi pengukuran kinerja Value For Money dilakukannya dengan memperhatikan :

- Aspek ekonomi
- Efisiensi
- Efektivitas

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Penggunaan anggaran dilakukannya secara hemat, tepat Sasaran dan mampu mencapai tujuan Pelayanan Publik.

Strategi yang dapat dilakukannya antara lain

- Menetapkan standar kinerja
- Melakukan pengawasan terhadap Penggunaan anggaran
- Meningkatkan transparansi Pengelolaan keuangan
- Menyusun laporan keuangan secara akurat
- Serta melakukan evaluasi Program secara berkala

Anggaran Pemerintahan memiliki fungsi sebagai alat Kebijakan Publik fiskal, dan alat Pengendalian.

5. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja antara lain:

- Sesuai dengan tujuan organisasi
- Dapat diukur secara jelas
- Relevan dengan pelayanan publik
- memiliki data yang tersedia
- Mudah dipahami
- serta dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan

Indikator kinerja juga harus mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca LAK, LO, LPE dan Lab